

**PENGARUH SEKTOR BASIS POTENSIAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2012 – 2017**

SKRIPSI



Oleh
MUH. FAISAL M
NIM 105710206414

**EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH SEKTOR BASIS POTENSIAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2012 – 2017**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar*

Oleh

MUH. FAISAL M

NIM 105710206414

**EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Allah tidak akan membebani seseorang hamba melainkan
sesuai kesanggupan”*

(Q.S. Al-Baqarah: 286)





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Sektor Basis Potensial Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2017"
Nama Mahasiswa : Muh. Faisal. M
No. Stambuk/NIM : 105710206414
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Skripsi Ini Telah Selesai Diujikan Di Depan Penguji Pada Hari Rabu Tanggal 3 Juli
2019 Di Gedung Iqra Lantai 8 Aula Mini Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar

Makassar, Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

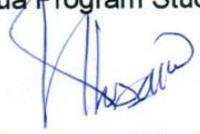

Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN : 0010026403


A. Nur Fitrianti, SE., M.Si
NIDN : 00903058703

Mengetahui,


Dekan,
Isdati Rasulong, SE., MM
NIM : 883978

Ketua Program Studi EP


Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN : 0010026403



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Muh. Faisal. M, NIM : 105710206414, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0004/SK-Y/60201/091004/2019, Tanggal 01 Dzulqaidah 1440 H/ 03 Juli 2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor UNISMUH Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM (.....) (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Hj. Naidah, SE., M.Si (.....)
2. Dr. H. Muh. Rusydi, M.Si (.....)
3. Dr. Andi Jam'an, MM (.....)
4. Asdar, SE., MM (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muh. Faisal M
Stambuk : 105710206414
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : “ Pengaruh Sektor Basis Potensial Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Jeneponto
Tahun 2012 – 2017 ”

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



**Muh. Faisal M
NIM : 105710206414**

Mengetahui,



Ketua Program Ekonomi
Pembangunan

**Hj. Naidah, SE.,MM
NIDN : 0010026403**

ABSTRAK

Muh. Faisal. M, Nomor Induk Mahasiswa 105710206414 Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Makassar skripsi dengan judul Pengaruh Sektor Basis / Potensial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 - 2017 dibawah bimbingan. Hj. Naidah, SE., M.Si sebagai pembimbing I dan A. Nur Fitrianti, SE., M.Si sebagai peming II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto tahun 2012 – 2017 dan Sektor yang paling dominan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 - 2017 Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kuantitatif dengan studi kepustakaan dari berbagai dokumen, buletin, artikel-artikel dan karya ilmiah (skripsi) yang berhubungan dengan penulisan ini untuk mendapatkan Data Sekunder

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke tiga sektor yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan , Sektor Kontruksi, Sektor Perdagangan Besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda Motor Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dominan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 – 2017

Kata Kunci : Basis Potensial, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi



ABSTRACT

Muh. Faisal. M, Student Identification Number 105710206414 Economic Development Study Program, University of Muhammadiyah Makassar thesis with the title Effect of Base / Potential Sector on Economic Growth in Jenenepono Regency in 2012 - 2017 under guidance. Hj. Naidah, SE., M.Si as supervisor I and A. Nur Fitrianti, SE., M.Sc as peming II.

This study aims to determine the sectors that influence economic growth in Jeneponto Regency in 2012 - 2017 and the most dominant sectors influence the economic growth in Jeneponto Regency in 2012 - 2017. To achieve these objectives quantitative research methods are used to study literature from various documents, bulletins , articles and scientific papers (theses) related to this writing to obtain Secondary Data

The results showed that the three sectors, namely Agriculture, Forestry, and Fisheries, Construction Sector, Wholesale and Retail Trade and car and motorcycle repair sector had an effect on economic growth. And the Agriculture, Forestry and Fisheries Sector is dominant in influencing Economic Growth in Jeneponto Regency in 2012 – 2017.

Keywords: Potential Base, PDRB, Economic Growth



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian proposal. Rasa Terima Kasih yang sebsar besarnya kepada Kedua orang tua tercinta Kaharuddin Nawir dan Maesuri yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan. Ucapan Terima Kasih pula kepada Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE, MM dan Ibu Warda, SE, ME. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Terima kasih atas doa, motivasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE..MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, selaku Dekan Fakuftas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si, selaku ketua Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
4. Bapak/ibu para dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Teman dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, Juli 2019 M

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN PERSEMBAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN TEORI 6

A. Pembangunan Ekonomi Daerah 6

B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 9

C. Sektor Basis 11

D. Kriteria Penentuan Sektor Unggulan	12
E. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah	15
F. Tinjauan Empiris	21
G. Kerangka Pikir	26
H. Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Sumber Data	28
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Metode Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto.....	33
B. Gambaran Umum BPS	40
C. Hasil Penelitian	47
D. Hasil Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Hasil Regresi Berganda	47
Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4.3 Uji Signifikan	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPS Kab. Jeneponto	42
Gambar 4.2 Devendent Variabel Pertumbuhan Ekonomi	50
Gambar 4.3 Devendent Variabel Pertumbuhan Ekonomi.....	50
Gambar 4.4 Devendent Variabel Pertumbuhan Ekonomi.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelolah sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Namun sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau di sebut dengan otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah.

Hal ini membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain di bidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang di miliki oleh daerah.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah di tuntutan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Artinya, tidak hanya kesiapan pemerintah saja, tetapi peran masyarakat juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tidak sesuai dengan potensi yang di miliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi tidak optimal.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelolah berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah di atur dalam UU No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh pelosok tanah air. Sedangkan pembangunan sektor ekonomi merupakan proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat.

Untuk mencapai hasil pembangunan ekonomi yang diharapkan, maka perlu pula dilakukan perencanaan dan perkiraan terhadap setiap sektor maupun secara agregatif. Perlu pula dilakukan penekanan terhadap setiap sektor tertentu sehingga dapat dimungkinkan terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi satu sektor tertentu terhadap pembentukan PDRB dan dengan demikian dapat diketahui pula mana yang menjadi sektor unggulan dari daerah tersebut memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Sehingga untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan potensi yang dimiliki tersebut, maka perhatian utama ditujukan untuk melihat komposisi ekonomi yakni dengan mengetahui sumbangan atau peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau sektor dalam perekonomiannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah sangat penting diperlukan untuk mendukung kebijakan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menentukan sektor-sektor unggulan yang layak untuk dikembangkan serta pola perubahan dan pergeseran sektoral dalam perekonomian Kabupaten Jeneponto sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kabupaten Jeneponto yang terarah sehingga dapat merangsang terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Sektor – sektor apakah yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2017?

2. Sektor / Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2017? ”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dengan melihat permasalahan di atas adalah untuk mengetahui :

1. Sektor - sektor yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomian Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2017.
2. Sektor / Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2017? ”

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk di gunakan:

1. Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang sama.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad :2010).

Pembangunan ekonomi daerah dapat pula diartikan sebagai suatu proses pembentukan institusi institusi baru, pembangunan industri industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat yang di daerah tersebut sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif untuk melakukan pembangunan daerah dengan mengelola setiap sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Perbedaan kondisi setiap daerah membawa implikasi bahwa pola pembangunan yang akan diterapkan setiap daerah berbeda beda sesuai dengan karakteristik dan kekhasan daerah, karena peniruan pola kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu daerah yang berhasil belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Sehingga

kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi, permasalahan, serta potensi yang di miliki daerah yang bersangkutan (Arsyad :2010),

Rahardjo Adisasmita (2005), menyatakan bahwa pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pertumbuhan regional dapat terjadi akibat penentuan endogen atau eksogen, yaitu faktor faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor faktor yang terdapat di luar daerah atau kombinasi keduanya.

Pada hakekatnya teori pembangunan ekonomi daerah membahas tentang metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Pengembangan dari metode-metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaanya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakantindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang ada.

Teori atau model pertumbuhan ekonomi regional bertujuan untuk membahas secara rinci faktor faktor yang menentukan pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah, hal ini penting karena pada kenyataannya laju pertumbuhan ekonomi wilayah sangat bervariasi.

Todaro (dalam Bambang, 2000: 2) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*).
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia.
3. Meningkatnya kemauan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai empat sifat penting pembangunan ekonomi merupakan: Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Adisasmita (2005) mengungkapkan, dalam membangun perekonomian lokal maka pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya pembangunan diarahkan untuk mencapai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya perusahaan yang ada sekarang dan perusahaan baru, serta

mempertahankan basis ekonomi yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan.

B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila tingkat PDRB riil daerah tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah negatif, maka dikatakan perekonomian dari daerah tersebut sedang mengalami penurunan. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah positif maka dapat dikatakan perekonomian dari daerah tersebut mengalami peningkatan.

Teori pertumbuhan daerah menganalisis suatu daerah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan daerah-daerah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan daerah dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan daerah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari daerah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu daerah serta interrelasi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Menurut Rostow (dalam Nur, 2014: 2), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya. Sedangkan Menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan 2000: 57), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya dimana kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Selain itu dalam bukunya yang lebih awal Modern Economic Growth tahun 1966, ia mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan terus menerus dalam produk per kapita atau per pekerja, seringkali diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk dan biasanya dengan perubahan struktural (Jhingan, 2004).

Menurut Smith bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena spesialisasi akan mempertinggi tingkat produktifitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

C. Sektor Unggulan

Menurut Deptan (dalam Dewi, 2009) bahwa sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan adalah tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek karakteristik dari suatu perekonomian.

Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain.

Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik (Tambunan, 2001). Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat

memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2000).

Sektor unggulan menurut Tumenggung (1996) adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor (Mawardi, 1997). Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*).

Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001). Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. Karena di dalam PDRB terkandung informasi yang sangat penting diantaranya untuk melihat output sektor ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

D. Kriteria Penentuan Sektor Unggulan

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah

saat ini, dimama daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Adapun kriteria sektor unggulan menurut Sambodo (dalam Usya 2006) yaitu: pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu:

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Menurut Ambardi dan Socia (2002), kriteria komoditas unggulan suatu daerah, diantaranya:

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya.
3. Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).
5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
6. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Di saat komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.

8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan. Misalnya, dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.
10. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

E. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Menurut Glasson (1990), bahwa pengembangan daerah diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Disebutkan juga bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam jangka waktu relatif singkat.

Dari definisi tersebut dimaksudkan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan daerah tersebut akan merangsang daerah sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor

lain yang kurang potensial.

Menurut Arsyad (2010), bahwa permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Akibatnya daerah- daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak.

Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus, dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia.

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam

pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut.

Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi

(*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor- sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut. Perkembangan ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain sehingga membentuk *forward linkage* dan *backward linkage*. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan.

Pengembangan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Menurut Emma, sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, demi terciptanya kemandirian pembangunan wilayah. Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar

yang ditunjukkan dengan parameter-parameter seperti:

1. Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi.
2. Sektor yang mempunyai *multiplier effect* yang tinggi.
3. Sektor yang kandungan depositnya melimpah.
4. Memiliki potensi *added value* yang cukup baik.

Berdasarkan konsep wilayah/regional dalam satu kesatuan kegiatan perekonomian, pada masa otonomi daerah di harapkan dapat memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada dan melihat keterbatasan sumber daya kabupaten Jeneponto. Dengan melihat segala keterbatasan sumber daya yang ada, maka dalam perencanaan pembangunan tersebut perlu ditentukan sektor-sektor dan subsektor-subsektor ekonomi yang menjadi unggulan dan prioritas pembangunan di kabupaten Jeneponto agar perencanaan pembangunan tersebut dapat lebih terarah.

Adapun sektor-sektor ekonomi di kabupaten Jeneponto yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. salah satunya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat meningkat, bila ada satu atau beberapa sektor ekonomi yang berkembang lebih cepat dari pada sektor-sektor lain. Dengan demikian, sektor yang mempunyai perkembangan lebih cepat dari sektor lain akan menjadi suatu sektor unggulan. Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang:

★ Sektor basis dan non basis Kegiatan ekonomi wilayah Kabupaten Jeneponto, berdasarkan teori ekonomi basis diklasifikasikan ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Analisis *Location Quotion* diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonom daerah yang bersifat ekspor dan nonekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari tahun ke tahun.

Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada

pencapaian target sektoral, keberhasilannya dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya penurunan dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan perkembangan pembangunan suatu daerah.

F. Tinjauan Empiris

Penelitian ini sudah dilakukan oleh (Bambang Prishardoyo 2000) dengan judul Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh (I Dewa Made Darma Setiawan 2004) dengan judul Peranan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh (Zamida 2001) dengan judul analisis sector basis di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini juga sudah pernah dilakukan oleh (Hilal Almulaibari 2004) dengan judul Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi, Kota Tegal. Penelitian ini juga sudah pernah dilakukan oleh (Fitri Amalia (2012)) dengan judul Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB.

Tabel.1

Penelitian terdahulu

Nomor	Penulis, Tahun Judul Skripsi	Judul Skripsi	Metode Analisis	Rangkuman
	Bambang Prishardoyo (2000)	Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati	Deksriptif kuantitatif	Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah maka akan dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di lihat dari PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan

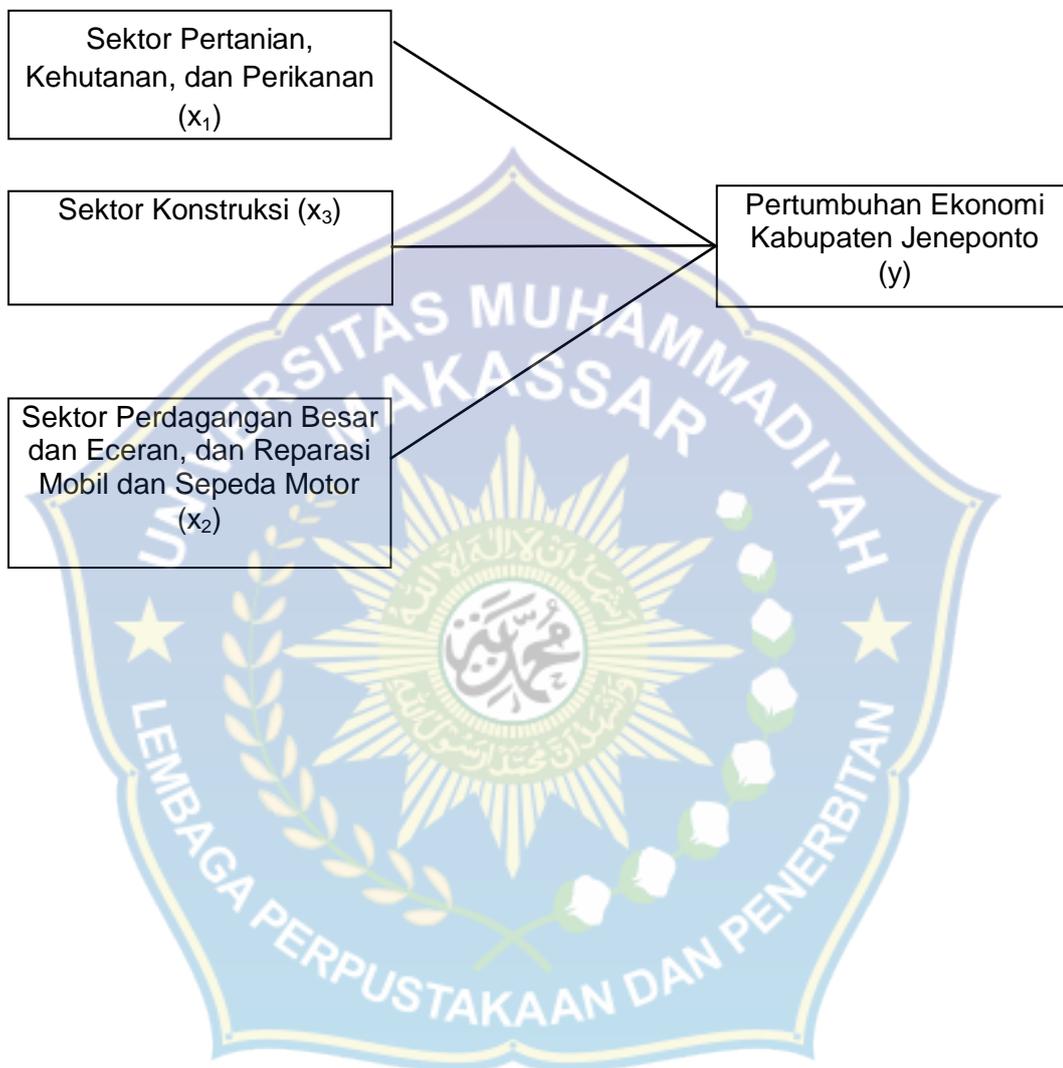
	I Dewa Made Darma Setiawan (2004)	Peranan Sector Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur	Deksriptif kuantitatif	Suatu perekonomian dikatakan mengalami mengalami pertumbuhan atau perkembangan juika tingkat kegiatannya meningkat atau lebih tinggi jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya
	Zamida (2001)	Analisis Sektor Basis Di Kabupaten Lamongan.	Deksriptif kuantitatif	Teori basis ekonomi ini menurut Lincolin Arsyad menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah

	<p>Hilal Almulaibari 2004</p>	<p>Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal</p>	<p>Deksriptif kuantitatif</p>	<p>Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah.</p>
	<p>Fitri Amalia (2012)</p>	<p>Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone</p>	<p>Deksriptif kuantitatif</p>	<p>Pengembangan metode untuk menganalisis suatu perekonomian suatu daerah penting sekali</p>

		Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB	kegunaanya sebagai sarana mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya. Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mempercepat laju pertumbuhan yang ada
--	--	---	---

G. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir



H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat diduga bahwa :

1. Sektor - sektor yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomian Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2017 adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi.
2. Sektor / Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2017 adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu kegiatan pada wilayah tertentu. Metode kuantitatif lebih cocok digunakan pada penelitian ini karena untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi dilakukan dengan cara mengukur variabel-variabel yang terkait berdasarkan PDRB sektoral untuk mengungkap dan membuktikan secara matematis sederhana berbagai data yang bersifat kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto, melalui data sekunder yang telah dituliskan di Badan Pusat Statistik (Jeneponto dalam angka dan Sulawesi Selatan dalam angka).

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah data PDRB Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2017 Atas Dasar Harga Konstan 2011, demikian juga data PDRB Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2012-2017 Atas Dasar Harga Konstan 2011, disertai dengan data-data sekunder lain yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari laporan BPS Kabupaten Jeneponto, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto, dan sumber lain seperti internet dan studi kepustakaan.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka ditempuh dengan cara Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari berbagai dokumen, buletin, artikel-artikel dan karya ilmiah (skripsi) yang berhubungan dengan penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder.

D. Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan metode pengaruh untuk menentukan Sektor Basis/Potensial dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dan hipotesis yang akan diuji maka alat analisis yang akan digunakan adalah model Regresi berganda dengan alat bantu SPSS.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

a = Konstanta

x_1 = Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

x_2 = Konstruksi.

x_3 = Sektor Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

e = Standar Error

1. Uji asumsi klasik

Pengujian menggunakan statistik regresi berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik. Ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang dibutuhkan penelitian ini :

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk melihat normal atau tidak normal data yang akan dianalisis. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas data ini digunakan pendekatan grafik, yaitu normality probability Plot. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terjadi varians gangguan berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan adalah :

1. Titik – titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0.
2. Titik – titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
3. Penyebaran titik – titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik – titik data sebaiknya tidak berpola. Semua ini dapat dikatakan terbatas dari heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas, jika terdapat korelasi maka telah terjadi masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik adalah tidak terkena multikolinieritas. Untuk mengetahuinya dapat dilihat melalui variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation

Factor (VIF) tidak lebih dari 5, maka model dapat dikatakan terbatas dari multikolinieritas.

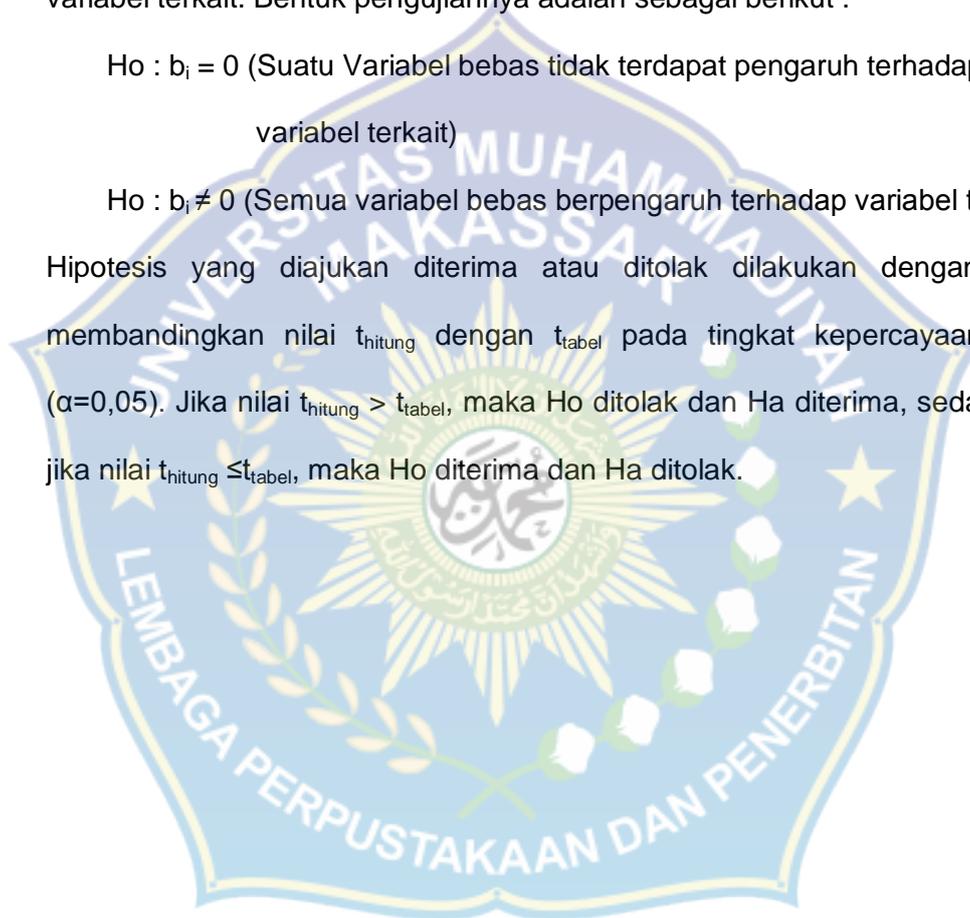
2. Uji Signifikan Secara Parsial (Uji – t)

Uji – t atau uji signifikan individual menunjukkan secara parsial pengaruh variabel terkait. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut :

$H_0 : b_i = 0$ (Suatu Variabel bebas tidak terdapat pengaruh terhadap variabel terkait)

$H_0 : b_i \neq 0$ (Semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait)

Hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$). Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto

a. Aspek Geografi dan Demografi

Pada sub-bab ini akan dipaparkan tentang kondisi geografi Kabupaten Jeneponto, yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari kondisi alam, dan juga kondisi demografi yang akan memperlihatkan potensi sumber daya manusia Jeneponto. Data dalam sub-bab ini akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan.

1. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km dan secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Selatan. Terkait luas wilayah Kabupaten Jeneponto, terdapat 4 sumber data yang berbeda. Data BPS Sulawesi Selatan (90.335 ha), Permendagri Nomor 6 tahun 2008 (70.652 ha), dan RTRW Kab. Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto citra satelit (79.953 ha) menampilkan data yang berbeda. Namun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka yang

digunakan adalah luas wilayah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. Untuk menyeragamkan data luas wilayah tersebut maka kedepannya di perlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri dan Bakor surtanal. Berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan sebelah Utara dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Bantaeng. Wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan Laut Flores memiliki panjang garis pantai 114 km dan sebuah pulau yang dikenal oleh masyarakat sebagai Pulau Li'bukang. Dengan panjang garis pantai 114 km maka kewenangan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 4 adalah 114 km x 4 mil laut ke arah laut lepas. Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan Bangkala Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014-2018 merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,69 km atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km atau 3,97% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten, Kabupaten Jeneponto
1	Arungkeke	29,91	3,97%
2	Bontomatene	152,69	20,40%

merupakan salah satu dari 24 daerah kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan.

Apabila dilihat bentangalamnya secara makro, wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014-2018

3. Klimatologi

Iklm (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kab. Jeneponto tergolong kering di hampir semua kecamatan, selain Kec Rumbia, Kelara dan sebagian Kec. Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala kekurangan air yang ekstrim. Adapun kondisi curah hujan wilayah ini yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, Jeneponto, Bisolero, Loka, Malakaji dan Takalar, menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan yang berkisar antara 1049–3973 mm/tahun. Keadaan musim di Kabupaten Jeneponto pada umumnya sama dengan keadaan musim di daerah kabupaten lain yakni terdiri dari 2 (dua) musim yaitu hujan dan kemarau, musim hujan terjadi antara Bulan November sampai dengan Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Mei sampai dengan Bulan

Oktober. Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatatan hujan, maka tipe iklim Kabupaten Jeneponto dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe yaitu iklim D3 dan Z4 dengan bulan kering berkisar 5-6 bulan sedangkan bulan basah berkisar 1-3 bulan. Tipe yang ke 2 (dua) adalah C2 yang memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan.

4. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Kabupaten Jeneponto diarahkan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Jeneponto termasuk dalam tahapan pengembangan baru untuk Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Nasional dengan Kategori Pengembangan/Peningkatan fungsi. Sementara itu dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi, Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Pulau Sulawesi dimana Jeneponto termasuk di dalamnya dengan mendorong pengembangan kota-kota sebagai pusat pelayanan sekunder;

- b. Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,69 km² atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km² atau 3,97% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Tabel Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto No Kecamatan Luas Wilayah (km²) Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
- | | | | |
|----|----------------|--------|--------|
| 1 | Bangkala | 121,82 | 16,25 |
| 2 | Bangkala Barat | 152,96 | 20,40 |
| 3 | Tamalatea | 57,58 | 7,68 |
| 4 | Bontoramba | 88,30 | 11,78 |
| 5 | Binamu | 69,49 | 9,27 |
| 6 | Turatea | 53,76 | 7,17 |
| 7 | Batang | 33,04 | 4,41 |
| 8 | Arungkeke | 29,91 | 3,99 |
| 9 | Tarawang | 40,68 | 5,43 |
| 10 | Kelara | 43,95 | 5,86 |
| 11 | Rumbia | 58,30 | 7,78 |
| | Total | 749,79 | 100,00 |
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Jeneponto Dalam Angka 2014, hal 2
- c. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2008- 2012

No	Tahun	Jumlah penduduk			Kepadatan	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	2008	160.526	171.808	332.334	443	0,48
2	2009	161.414	172.761	334.175	446	0,55
3	2010	166.384	176.316	342.700	457	2,49
4	2011	168.059	178.090	346.149	462	1,00
5	2012	169.025	179.113	348.138	464	0,57
Rata - Rata					454	1,02

B. Gambaran Umum Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS memiliki peran sebagai berikut:

- a) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.
- b) Membantu kegiatan statistik di institusi pemerintah dan lembaga lainnya dalam mengembangkan sistem perstatistikan nasional.
- c) Mengembangkan dan mempromosikan teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- d) Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Sedangkan BPS Kabupaten Jeneponto sebagai instansi vertikal BPS di daerah juga memiliki kewenangan yang sama dengan BPS secara umum

untuk level daerah. Entitas berkedudukan di Jalan Pelita Nomor 58 Bontosunggu, Kode pos 92311, Telepon (0419) 22256, Homepage: <http://jenepontokab.bps.go.id>, Email: bps7304@bps.go.id.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut, BPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS dipimpin oleh seorang kepala BPS dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Struktur organisasi BPS secara benjenjang mulai dari BPS Provinsi sampai dengan BPS Kabupaten/Kota. Berdasarkan struktur organisasi, BPS Kabupaten Jeneponto merupakan bagian dari kelembagaan BPS yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan dalam lingkup Kabupaten Jeneponto.

1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Jeneponto

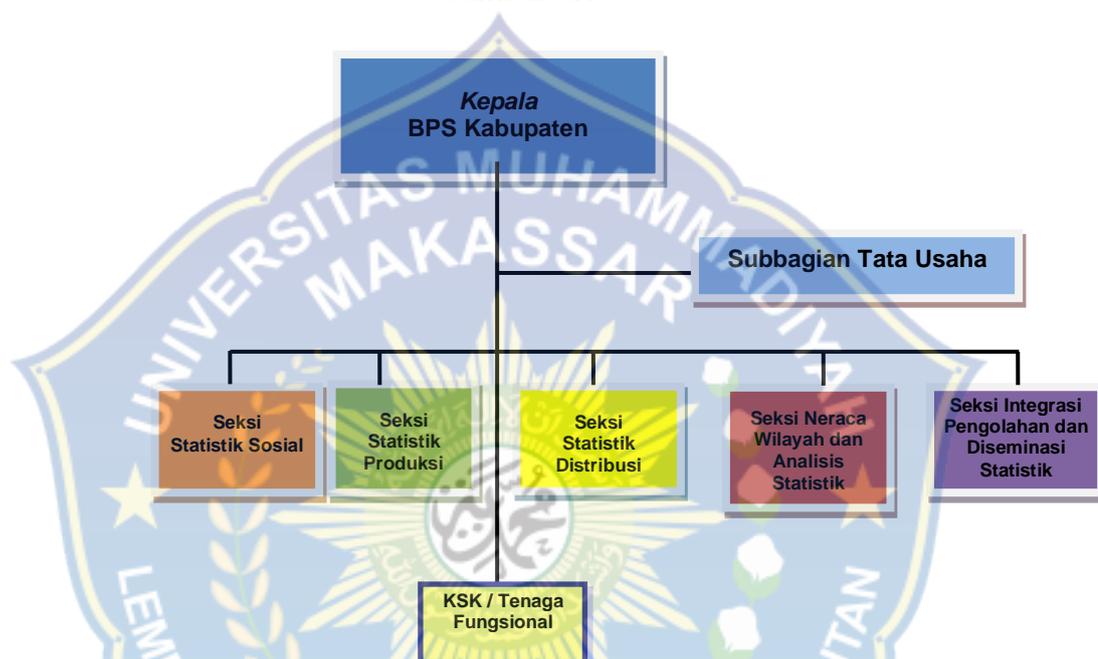
Organisasi dan tata kerja BPS diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS (Pusat) dan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di daerah.

Struktur Organisasi BPS Kabupaten Jeneponto terdiri dari 5 Seksi dan 1 Subbagian Tata Usaha untuk Eselon IVa.

Struktur Organisasi

BPS Kabupaten Jeneponto

Gambar 4.1



2. VISI BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam dokumen Rencana strategis (Renstra) BPS Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019 telah tertuang perencanaan pembangunan Kabupaten Jeneponto di bidang statistik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra tersebut menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran BPS Kabupaten Jeneponto khususnya penyelenggaraan kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik.

Upaya BPS Kabupaten Jeneponto untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu **“Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”** sebagaimana yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS Kabupaten Jeneponto menetapkan visi dan misi tahun 2015-2019 yang sama dengan visi dan misi BPS RI yaitu:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”,

“The Agent of Trustworthy Statistical Data For All”

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Disamping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

3. MISI BADAN PUSAT STATISTIK

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015 – 2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Misi BPS adalah:

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

4. TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS. Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas,
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik,
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik,
4. Peningkatan Birokrasi yang akuntabel.

5. SASARAN STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

- a. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas", adalah:
 1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, indikator sasaran:

- a) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
 - b) Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
 - c) Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
 - d) Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi
 - e) Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu
 - f) Jumlah release data statistik yang tepat waktu
 - g) Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu
2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*), indikator sasaran:
- a) Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga
 - b) Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha
 - c) Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha
3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien, Indikator sasaran:
- a) Jumlah *self assement* aktivitas statistik mandiri yang dihimpun

b. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik", adalah:

1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*), dengan indikator sasaran:

- a) Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS
 - b) Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
 - c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
 - d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS
 - e) Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.
- c. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik", adalah:
1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
 - a) Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun
 2. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
 - a) Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada kementerian/lembaga
- d. Sasaran strategis dari tujuan keempat: "Peningkatan birokrasi yang akuntabel", adalah:
1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
 - a) Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
 - b) Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
 - a) Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB
 - b) Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB
 - c) Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)
 - d) Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

C. HASIL PENELITIAN

1. Hasil Regresi Berganda

Tabel 4.1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1605022.722	78531.760		20.438	.002
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	.300	.072	.459	4.149	.053
	Konstruksi	1.288	.577	.479	2.234	.155
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	.194	.714	.075	.271	.812

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel 4.13 diatas, dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :

$$Y = 1605022.722 + 0,300 X_1 + 1.288 X_2 + 0,194 X_3$$

Interprestasi dari regresi adalah sebagai berikut :

1) Konstanta (a)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai 0 maka nilai variabel terikat (Perbandingan Konsumen) sebesar 1605022.722

2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Nilai koefisien Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk variabel X1 sebesar 0,300. Hal ini mengandung arti bahwa setiap Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan satu satuan maka variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan naik sebesar 0,300 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

3) Kontruksi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Nilai koefisien Kontruksi untuk variabel X2 sebesar 1.288, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kontruksi (X2) maka variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan naik sebesar 1.288 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Nilai koefisien Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor untuk variabel X3 sebesar 0.194, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kontruksi (X3) maka variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan naik sebesar 0.194 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

2. Uji asumsi klasik

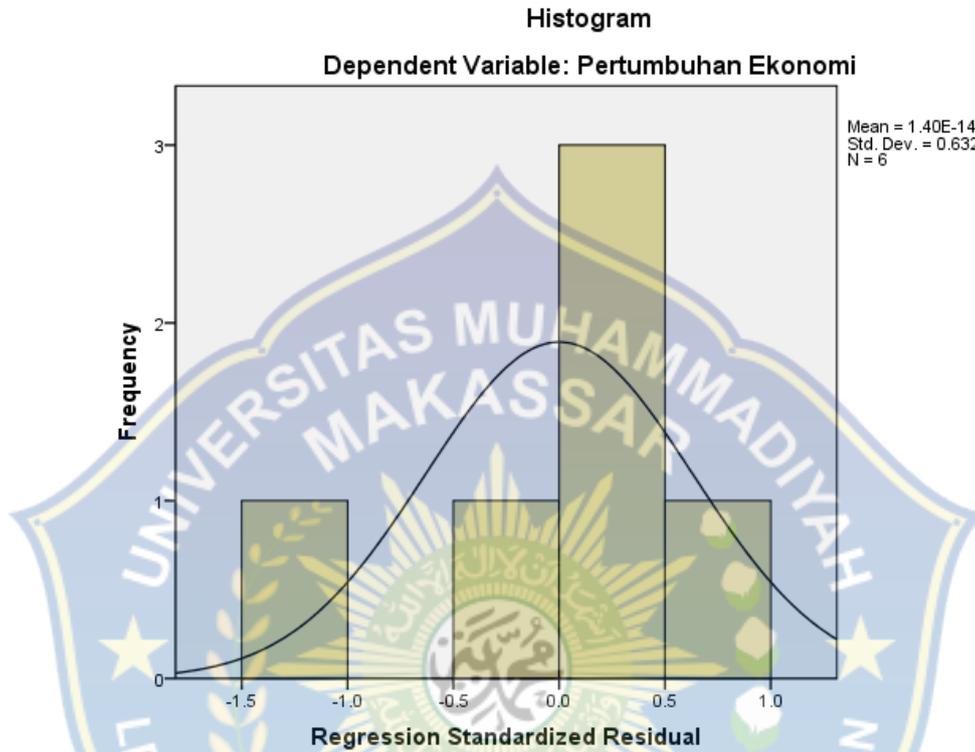
Pengujian menggunakan statistik regresi berganda mensyaratkan dilakukannya pengajuan asumsi klasik.

C. HASIL PEMBAHASAN

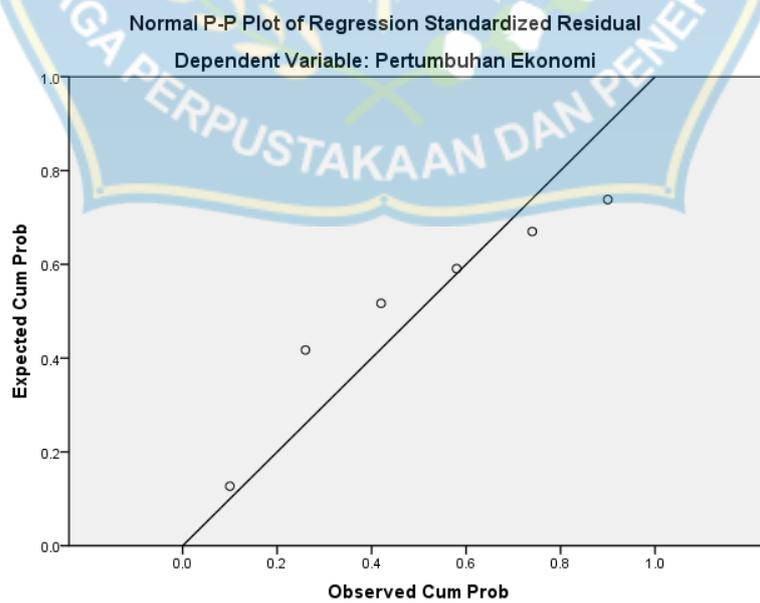
Penelitian ini sudah dilakukan oleh (Bambang Prishardoyo 2000) dengan judul Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh (I Dewa Made Darma Setiawan 2004) dengan judul Peranan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh (Zamida 2001) dengan judul analisis sector basis di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini juga sudah pernah dilakukan oleh (Hilal Almulaibari 2004) dengan judul Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi, Kota Tegal. Penelitian ini juga sudah pernah dilakukan oleh (Fitri Amalia (2012)) dengan judul Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 - 2017. Kemudian dari analisis yang dilakukan juga menjelaskan bahwa variabel (X_1) yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (X_2) Kontruksi (X_3)Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y) Pertumbuhan Ekonomi sudah cukup baik dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

a. Uji Normalitas

Gambar 4.2

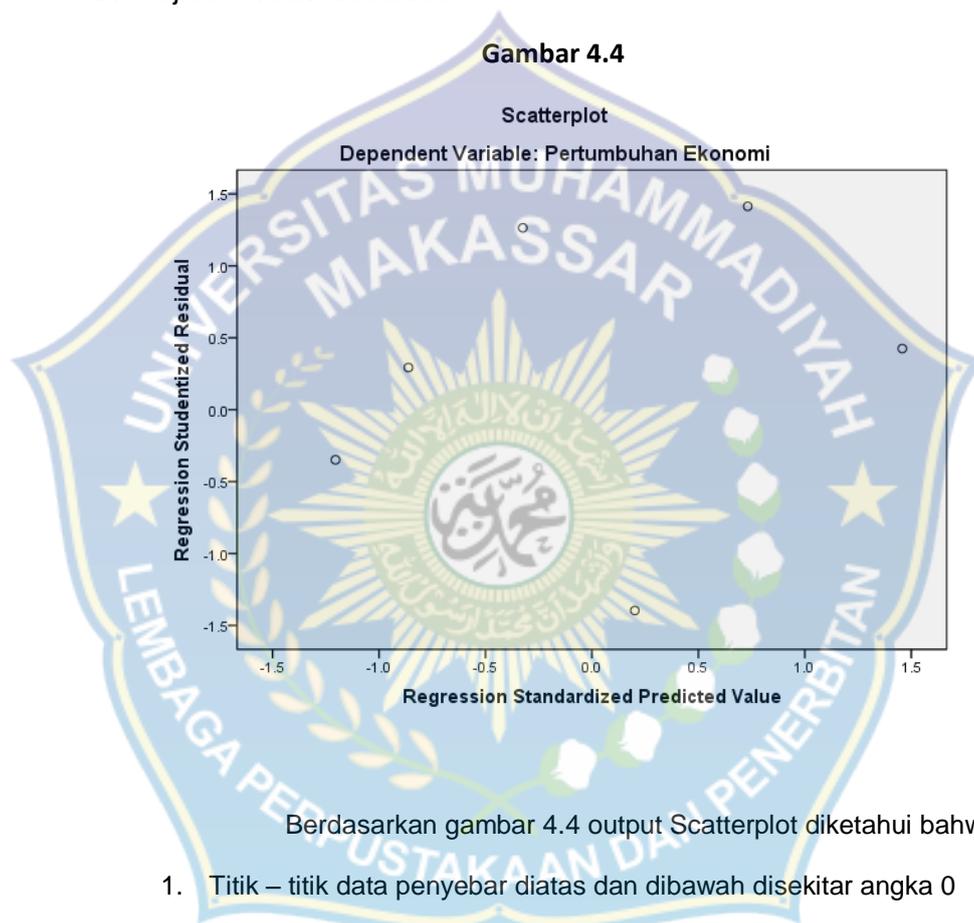


Gambar 4.3



Berdasarkan tampilan gambar 4.2 dan gambar 4.3 dimana grafik instagam memberikan pola distribus yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data distribusi normal. Selanjutnya pada gambar P Plot terlihat titik – titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas



1. Titik – titik data penyebar diatas dan dibawah disekitar angka 0
2. Titik – titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
3. Penyebaran titik – titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
4. Penyebaran titik – titik data tidak berpola

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi

c. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1605022.722	78531.760		20.438	.002		
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	.300	.072	.459	4.149	.053	.053	18.961
	Konstruksi	1.288	.577	.479	2.234	.155	.014	71.236
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	.194	.714	.075	.271	.812	.008	118.262

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan table 4.1 diketahui bahwa nilai tolerance variabel X1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yakni :0.053 lebih Kecil dari 0.10, nilai tolerance variabel X2 Kontruksi 0.014 lebih Kecil dari 0.10, dan nilai tolerance variabel X3 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.008 lebih kecil dari 0.10. sehingga dapat disimpulkan terjadi Multikolinieritas.

d. Uji Signifikan Secara Parsial (Uji – t)

Tabel 4.3
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1605022.722	78531.760		20.438	.002
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	.300	.072	.459	4.149	.053
	Konstruksi	1.288	.577	.479	2.234	.155
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	.194	.714	.075	.271	.812

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan table 4.3 di peroleh nilai t hitung untuk variabel x1 (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) 4.149 sedangkan nilai t tabel 1.943. maka dapat diketahui t hitung (4.149) > t tabel (1.943) atau dengan kata lain H1 diterima dan H0 di tolak. Maka dapat disimpulkan variabel x1 mempunyai pengaruh terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi). Nilai hitung untuk variabel x2 (Konstruksi) 2.234 sedangkan nilai t tabel 1.943. maka dapat diketahui t hitung (2.234) > t tabel (1.943) atau dengan kata lain H1 diterima dan H0 di tolak Maka dapat disimpulkan variabel x2 mempunyai pengaruh terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi). nilai t hitung untuk variabel x3 (Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) 0.271 sedangkan nilai t tabel 1.943. maka dapat diketahui t hitung (4.149) < t tabel (1.943) atau dengan kata lain H1

ditolak dan H_0 di terima. Maka dapat disimpulkan variabel x_3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

Penelitian ini sudah dilakukan oleh (Bambang Prishardoyo 2000) dengan judul Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh (I Dewa Made Darma Setiawan 2004) dengan judul Peranan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh (Zamida 2001) dengan judul analisis sector basis di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini juga sudah pernah dilakukan oleh (Hilal Almulaibari 2004) dengan judul Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi, Kota Tegal. Penelitian ini juga sudah pernah dilakukan oleh (Fitri Amalia (2012)) dengan judul Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 - 2017. Kemudian dari analisis yang dilakukan juga menjelaskan bahwa variabel (X_1) yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (X_2) Kontruksi (X_3)Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y) Pertumbuhan Ekonomi sudah cukup baik dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan Bab IV Sebelumnya dapat di tarik kesimpulan bahwa.

Dari hasil analisis diatas telah mampu menjelaskan bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 - 2017. Kemudian dari analisis yang dilakukan juga menjelaskan bahwa variabel (X_1) yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (X_2) Kontruksi (X_3) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y) Pertumbuhan Ekonomi sudah cukup baik dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. SARAN

1. Saran bagi pemerintah Jeneponto, Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian pelaku pembangunan pertanian harus mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup.. Untuk lebih meningkatkan sektor kontruksi di kabupaten Jeneponto, pemerintah kabupaten Jeneponto harus mampu Meningkatkan kegiatan penyuluhan guna menggalakan sistem alih teknologi dan percepatan penyebaran informasi pembangunan dalam sebuah daerah. Untuk lebih meningkatkan sektor perdagangan dalam sebuah daerah, pemerintah kabupaten Jeneponto

harus mampu meningkatkan pemerataan harga dalam sebuah perdagangan baik itu dari perdagangan besar maupun kecil.

2. Saran bagi peneliti, semoga skripsi yang berjudul Pengaruh Sektor Basis/Potensial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto mampu bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan mampu dijadikan sebagai referensi untuk penyusunan skripsi selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Agustina, Dewi, 2009. *Kadar Lignin dan Tipe Monomer Penyusun Lignin pada kayu Akasia*. Skripsi Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB, tidak diterbitkan, Bogor.
- Ambardi, U.M. dan social, P. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Pusat Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah (P2KTPW.BPPT). Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jeneponto 2012- 2017*.
- Bambang. 2000. *Analisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi Terhadap produk domestik regional lbruto (Pdrb) Kabupaten pati tahun2000-2005*. Skripsi Semarang : UNE
- Glasson, John. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional (An Introduction to Regional Planning)*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta : FE UI.
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mawardi, I. 1997. *Daya Saing Indonesia Timur Indonesia dan Pengembangan Ekonomi Terpadu*. Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi & Sosial.
- Muhnito, M. 2013. digilib.unila.ac.id/976/8/BAB%20II.pdf. Jurnal Ekonomi.
- Rachbini, Didik J. 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ramadhan, Nur. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. <http://ramadhanaprillio.blogspot.co.id/214/5/makalahekonomipembanguna> nteori. Online. Diakses pada tanggal 23 april 2018 (18.15) .
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana.
- Suyatno. 2000. *Teori Basis Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.

- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tumenggung, S. 1996. *Gagasan dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kawasan Timur Indonesia)* . Jakarta : Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta Karya Departemen PU.
- Usya, N. 2006. *Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.IPB. Bogor.



RIWAYAT HIDUP



Skripsi ini ditulis oleh seorang Putra dari Kelurahan Togo - Togo, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Anak ketiga dari Empat bersaudara pasangan bapak Mustapa Molla dan ibu Maryam. Kakak pertama bernama Bahtiar, SE dan kakak kedua bernama Sri Sukmawati dan Adik Bungsu Saya Bernama Muh. Firdaus M

Penulis lahir pada bulan Oktober tahun 1996. Mengawali pendidikan di bangku Sekolah Dasar Inpres No.129 Togo – Togo Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di MTs. Darul Ihsan Munte, Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang, selanjutnya penulis diterima di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis menjalani Program Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gowa.

Pada tanggal 03 Juli 2019, penulis dinyatakan LULUS melalui sidang tertutup Program Studi Ekonomi Pembangunan dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE) .



